



## Dampak Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Watuagung

Adiibah Afifah Nahdah<sup>1</sup>, Marseto<sup>2</sup>, Renny Oktafia<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Received: 20 Oktober 2023  
Revised : 27 Oktober 2023  
Accepted: 01 November 2023

### Abstract

*This study aims to determine the impact of the distribution of Self-Help Housing Stimulant Assistance as an effort to improve the welfare of the community in Watuagung Village, Dongko District, Trenggalek Regency. In this study using qualitative research methods through a descriptive approach. This method functions to get an overview of the phenomenon of the problem being observed. Then this study uses primary data types obtained from interviews, observation, and documentation. Then it also uses secondary data types obtained through the Trenggalek Regency Central Bureau of Statistics and Sectoral Data. Where, based on the results of the research, it shows that the distribution of Self-Help Housing Stimulant Assistance has reduced the burden on beneficiaries who are low-income people in order to be able to meet the needs of livable houses so as to improve their welfare. In addition, this assistance has also increased the number of livable houses in the village of Watuagung and encouraged the self-reliance of beneficiaries through empowerment activities during the implementation of the assistance distribution.*

**Keywords:** Policy Impact, Empowerment, Community Welfare

(\*) Corresponding Author: [marseto.es@upnjatim.ac.id](mailto:marseto.es@upnjatim.ac.id)

**How to Cite:** Nahdah, A. A., Marseto, & Oktafia, R. (2023). Dampak Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Watuagung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10072549>

## PENDAHULUAN

Setiap negara tidak akan luput dari permasalahan kemiskinan, terutama pada negara berkembang dan tertinggal. Kemiskinan merupakan permasalahan utama pada perekonomian suatu negara. Indonesia yang termasuk dalam negara berkembang juga masih berupaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang yang dari sisi ekonominya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Individu dikategorikan penduduk miskin ketika rata-rata pengeluaran perkapitanya lebih rendah dari garis kemiskinan. Oleh sebab itu, penduduk miskin mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2022 telah mengalami penurunan sebanyak 0,14 juta jiwa dibandingkan dengan tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022). Sedangkan di tahun 2020 jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat sebesar 2.76 juta jiwa dibandingkan pada tahun 2019. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia memiliki respon yang positif terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Namun masih juga terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang tidak dapat luput dari persoalan kemiskinan, salah satunya ialah kabupaten Trenggalek. Terjadi peningkatan angka penduduk miskin pada tahun 2020 di kabupaten Trenggalek, hal ini dibuktikan dengan data dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 1.** Garis Kemiskinan, Jumlah, serta Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Trenggalek

<b>Tahun</b>	<b>Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (ribu)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>
2016	275.426	91.94	13.24
2017	288.779	89.77	12.69
2018	308.644	83.50	12.02
2019	323.787	76.44	10.98
2020	340.915	81.06	11.62

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek paling banyak di tahun 2016 yaitu sebesar 91,94 ribu penduduk. Kemudian pada tahun berikutnya terjadi penurunan sebesar 0,55% sehingga terdapat 89,77 ribu yang tergolong penduduk miskin. Penurunan angka kemiskinan tersebut terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin mencapai angka 76,44 ribu. Namun, pada tahun 2020 terjadi peningkatan penduduk miskin sebesar 0,64%. Tahun 2020 penduduk miskin pada kabupaten Trenggalek mencapai angka 81,06 ribu penduduk. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukannya evaluasi oleh pemerintah daerah terkait ketepatan penanganan kemiskinan di kabupaten Trenggalek. Pendapat tersebut selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Kemenuh dan Wenagama (2017), dimana pelaksanaan penanganan masalah kemiskinan di beberapa wilayah Indonesia masih belum efektif dilakukan.

Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya masalah kemiskinan di suatu negara. Salah satunya disebabkan oleh tidak meratanya distribusi pendapatan, dimana hal tersebut menimbulkan adanya perbedaan pendapatan oleh setiap individu. Ketimpangan pendapatan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti perbedaan pemenuhan kebutuhan papan.

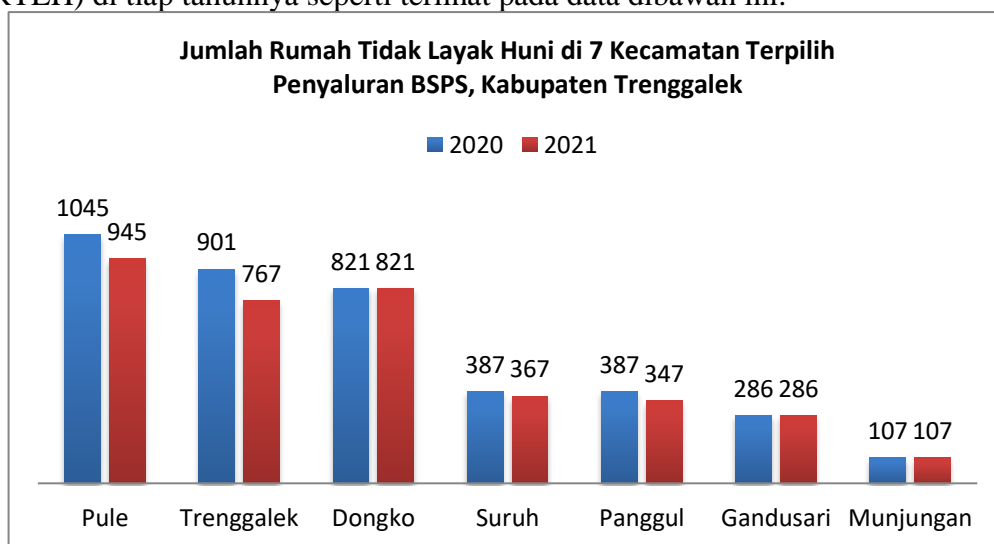
Kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok yang sulit untuk dipenuhi masyarakat. Banyak keluarga yang tidak mampu untuk menghuni rumah yang layak. Hal tersebut disebabkan oleh biaya yang harus dikeluarkan untuk memiliki sebuah rumah layak huni memerlukan jumlah yang besar. Dimana UU No. 39 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa tiap individu mempunyai hak untuk tinggal serta berkehidupan yang layak. Dengan begitu pemerintah harus ikut andil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

Vincent G. Hutchinson mengemukakan bahwa kesejahteraan dapat dikatakan sebagai “mutu kehidupan” yang berpedoman pada kedayagunaan dan menunjukkan kualitas kelompok tertentu untuk melaksanakan pelayanan pada kehidupan (Rosyidi, 2019). Setiyawati dan Oktafia (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan secara umum bahwa kesejahteraan ialah terwujudnya rasa aman, damai, dan bahagia. Dimana untuk melakukan peningkatan terhadap mutu kehidupan dapat dilaksanakan secara kondusif dengan melakukan bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan sosial. (Hidayati & Oktafia, 2020). Banyak aspek yang diperlukan untuk mengukur tingkat kesejahteraan, dimana salah satunya

dapat diukur dengan kepemilikan rumahnya. Ketika masyarakat memiliki rumah layak huni, maka setidaknya beban yang harus ditanggung telah berkurang. Dengan begitu pendapatan diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang lain. Hal tersebut secara perlahan akan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ialah dukungan dari pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai upaya peningkatan dan pemenuhan rumah layak huni (Permen PU No.7 th 2022). Rumah yang layak dapat menjamin keselamatan dan kesehatan penghuninya. Hal tersebut sesuai dengan gagasan Herlina, Nawawi, dan Anggarini (2021), yang menyatakan bahwa rumah berperan penting bagi setiap individu ataupun keluarga. Dimana bantuan ini juga dapat menstimulasi dan meningkatkan keswadayaan Penerima Bantuan (PB) sebagai pemenuhan rumah layak huni. Oleh sebab itu, program BSPS dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata.

Salah satu wilayah yang melaksanakan program BSPS pada tahun 2023 ini adalah kabupaten Trenggalek. Terdapat 31 desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Trenggalek yang telah memenuhi kriteria untuk menerima penyaluran program BSPS. Adapun tujuannya untuk menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tiap tahunnya seperti terlihat pada data dibawah ini.



**Bagan 1.** Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di 7 Kecamatan Terpilih Penyaluran BSPS, Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2021

*Sumber: Data Statistik Sektoral Kabupaten Trenggalek*

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa pada tahun 2020-2021 terjadi penurunan jumlah RTLH di kecamatan Pule, Trenggalek, Suruh dan Panggul. Namun, penurunan tersebut tidak terjadi di kecamatan Dongko dan Kecamatan Munjungan. Tercatat sebanyak 821 rumah di kecamatan Dongko termasuk dalam kriteria RTLH. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa diperlukan peran pemerintah agar dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya. Program BSPS telah disalurkan pada 10 desa di kecamatan ini pada tahun 2023.

Hadirnya program BSPS ini diharapkan mampu memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumahnya. Dengan begitu MBR dapat menghuni rumah yang sehat, aman, dan layak. Rumah yang layak setidaknya secara perlahan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, penelitian ini dibuat dengan judul “Dampak Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Desa Watuagung”

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Watuagung?
2. Apa saja dampak dari implementasi penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Watuagung?

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan agar dapat menggambarkan fenomena permasalahan yang sedang terjadi. Dimana metode penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dampak dari implementasi penyaluran BSPS secara runtut, objektif, dan saksama.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, tepatnya pada 10 penerima bantuan yang berada di Desa Watuagung. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di wilayah tersebut disebabkan oleh tidak adanya penurunan jumlah RTLH di tahun 2020-2021. Fenomena tersebut membuat Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek menjadi wilayah terpilih untuk dilaksanakannya penyaluran BSPS. Oleh karena itu, peneliti melaksanakan penelitian di wilayah tersebut untuk melihat dampak dari implementasi penyaluran BSPS di Desa Watuagung, Kecamatan Dongko pada tahun 2023.

### **Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data primer dan juga sekunder. Adapun data primer didapatkan melalui wawancara pada penerima BSPS di Desa Watuagung. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui Jenis data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran fenomena penelitian secara nyata. Data sekunder didapatkan dari literature yang berkaitan dengan fenomena pada penelitian ini. Seperti didapatkan melalui Badan Pusat Statistik, Data Sektoral Kabupaten Trenggalek, dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Teknik pengumpulan data primer**

Pengambilan data primer pada penelitian ini dilaksanakan dengan wawancara. Teknik wawancara ini dilaksanakan dengan memberikan beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian (Farida, 2020). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada 10 penerima bantuan BSPS di Desa Watuagung. Observasi juga dilakukan sebagai proses pengambilan data untuk penelitian ini. Observasi ialah suatu teknik pengambilan data dengan melakukan pengamatan fenomena yang kemudian

dilakukan pencatatan secara teratur (Khaatimah dan Wibawa, 2017). Pengambilan data juga dilakukan dengan teknik dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan menggabungkan serta menganalisis dokumen, baik dari dokumen tertulis, gambar ataupun elektronik. (Sukmadinata, 2013:220).

b. Teknik pengumpulan data sekunder

Pengambilan data sekunder dilaksanakan dengan menghimpun data-data yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan ataupun fenomena yang dibahas dalam penelitian ini. data sekunder diperoleh melalui literature yang berkaitan, data dari Badan Pusat Statistik, data dari pemerintah daerah, dan peraturan perundangan-undangan terkait.

**Teknik Analisis dan Interpretasi Data**

a. Reduksi data

Teknik analisis ini dilakukan dengan memilih dan memusatkan perhatian untuk menyederhanakan, mengolah dan melakukan transformasi data yang telah diperoleh pada lapangan (Yusra, dkk., 2021). Dimana data yang didapatkan berasal dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan.

b. Penyajian data

Teknik analisis ini dilaksanakan dengan menyajikan data dari informasi yang telah didapatkan selama melakukan wawancara maupun observasi pada penerima bantuan.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah menganalisis data, maka dilakukan pengambilan kesimpulan dari hasil analisis penelitian. Dengan begitu diharapkan penelitian ini dapat menjawab dampak dari implementasi penyaluran BSPS sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Watuagung.

**Uji Kredibilitas**

Triangulasi merupakan suatu teknik untuk membuktikan keaslian data melalui sesuatu dari luar data tersebut (Yusra, dkk., 2021). Berikut merupakan jenis-jenis Triangulasi.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi data merupakan teknik untuk mengukur kredibilitas data melalui berbagai informan. Dimana triangulasi sumber dapat dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan informan lain. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil data yang akurat.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi ini digunakan untuk mengukur kredibilitas data melalui pengambilan data yang berbeda namun berasal dari sumber yang sama. Peneliti menghubungkan data yang didapatkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi ini berfungsi untuk mengukur kredibilitas data dengan melakukan pengumpulan data pada situasi dan waktu yang berbeda (Alfansyur dan Mariyani, 2020). Wawancara dan observasi akan dilakukan pada situasi dan waktu yang berbeda untuk mendapatkan kebenaran data.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Watuagung, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek**

Implementasi merupakan suatu tindakan dari perencanaan yang telah dibuat untuk mewujudkan maupun mencapai suatu tujuan tertentu. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan berpegang teguh pada pedoman-pedoman yang telah disusun demi tercapainya suatu tujuan. Hal tersebut sesuai dengan penyaluran BSPS yang memiliki tujuan memberdayakan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah agar kualitas rumah dapat meningkat sehingga masyarakat menghuni rumah yang sehat, aman, dan layak. Direktorat Jenderal Perumahan menyelenggarakan program BSPS sebagai upaya pemenuhan rumah layak huni khususnya untuk MBR. Dimana bantuan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022. Adapun Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan No. 14/SE/Dr/2022 yang menjelaskan lebih rinci terkait dengan petunjuk teknis penyelenggaraan program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.

Pelaksanaan BSPS di desa Watuagung dilakukan sesuai dengan pedoman-pedoman tersebut. Dimana telah dilakukan Verifikasi Lapangan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) kepada 12 masyarakat yang diusulkan perangkat desa. Hasil dari verifikasi lapangan tersebut hanya terdapat 10 masyarakat desa Watuagung yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Kriteria penerima bantuan tersebut telah dijelaskan dalam Lampiran II dari SE No. 14/SE/Dr/2022 diantaranya yaitu penerima bantuan merupakan warga negara Indonesia yang telah berkeluarga, mempunyai bukti kepemilikan tanah, termasuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah, menghuni rumah yang tidak layak, belum pernah mendapatkan penyaluran BSPS, dan sanggup untuk mengikuti ketentuan program. Dengan begitu telah ditetapkan 10 penerima bantuan di desa Watuagung oleh Direktur Jenderal Perumahan. Berikut merupakan implementasi pelaksanaan penyaluran BSPS di desa Watuagung, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek.

#### **1. Implementasi Subsidi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya**

Kementerian PUPR memberikan besaran BSPS ini sejumlah Rp 20.000.000,- kepada setiap penerima bantuan. Dimana sebanyak Rp 17.500.000,- diberikan kepada penerima bantuan berupa bahan bangunan baru. Sedangkan sebesar Rp 2.500.000,- diberikan kepada penerima bantuan untuk dibayarkan kepada pekerja/tukang sebagai upah. Dalam pelaksanaannya subsidi dana yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah Penerima Bantuan (PB) ini dinilai masih kurang. Faktanya pembangunan rumah layak huni memerlukan dana lebih dari subsidi yang telah disalurkan oleh Kementerian PUPR. Oleh sebab itu, keswadayaan masyarakat berperan penting dalam program ini untuk mendukung pembangunan rumah. Swadaya masyarakat dalam hal ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti berupa bahan material lama yang dapat digunakan kembali, tabungan penerima bantuan, hasil panen maupun hasil ternak yang dimiliki penerima bantuan dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa program ini dapat mendorong tingkat kepedulian masyarakat sekitar yang juga dapat dikatakan sebagai sumber daya manusia untuk membantu proses pembangunan rumah. Dengan begitu bantuan ini dapat mewujudkan pemenuhan rumah layak huni pada kabupaten Trenggalek.

## 2. Implementasi Pembangunan Rumah Layak Huni

Pelaksanaan fisik pembangunan rumah layak huni di desa Watuagung memerlukan waktu selama 5 bulan. Adapun pengiriman bahan bangunan untuk pembangunan dilakukan dalam dua tahap. Pengiriman bahan bangunan tahap pertama dilakukan setelah penerima bantuan melakukan pembelian material. Pihak toko/penyedia bahan bangunan akan mengirimkan bahan bangunan yang telah dipesan ke PB. Dengan begitu penerima bantuan dapat melakukan pembangunan rumah tahap pertama. Adapun proses pembangunan rumah tahap pertama dilakukan hingga mendapatkan progress sebesar 30%. Kemudian pihak toko/penyedia bahan bangunan akan mengirimkan bahan bangunan tahap kedua. Setelah pengiriman bahan bangunan tahap kedua ini penerima bantuan dapat melanjutkan pembangunan rumah hingga selesai. Proses pembangunan yang telah selesai akan dilanjutkan dengan peninjauan oleh TFL. Tercatat sebanyak 10 rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasila rendah telah berdiri sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pemenuhan rumah layak huni.

## 3. Implementasi Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki peran penting pada penyaluran BSPS untuk mendongkrak keswadayaan penerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni. Implementasi pemberdayaan di desa Watuagung dilaksanakan dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat. Dalam hal ini TFL berperan sebagai pendamping penerima bantuan. Pendampingan penerima bantuan oleh TFL dilakukan dari awal hingga akhir penyaluran BSPS. Adapun pendampingan kegiatan BSPS diawali dengan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kegiatan BSPS kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menyebarluaskan informasi dan memberikan pemahaman kepada stakeholder serta masyarakat terkait dengan penyelenggaraan BSPS. Kemudian pendampingan juga dilaksanakan pada saat rembug warga untuk membahas identifikasi kerusakan rumah, rencana perbaikan komponen yang rusak, dan menggali keswadayaan masyarakat. Selanjutnya, pada pelaksanaan pembangunan fisik rumah TFL juga melakukan pendampingan dengan melakukan pengecekan progress pembangunan secara berkala. Kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pembangunan rumah dilaksanakan sesuai standar rumah layak huni. Pendampingan oleh TFL juga dilakukan saat penyiapan administrasi baik pada saat pembuatan proposal maupun saat pembuatan laporan penggunaan dana. Oleh sebab itu, komunikasi antar stakeholder harus tetap terjaga dan terjalin dengan baik.

Dalam pelaksanaan penyaluran BSPS, komunikasi antar pelaksana kegiatan telah terjalin dengan baik. Terjalin komunikasi yang positif baik terhadap perangkat desa, pihak toko/penyedia bahan bangunan, penerima bantuan, tenaga kerja atau tukang, TFL, maupun koordinator BSPS setiap daerah. Selama pelaksanaan kegiatan peneliti menemukan terjadi komunikasi dua arah baik antara TFL dengan Penerima Bantuan, maupun TFL dengan perangkat desa. Namun, peneliti menemukan kurangnya komunikasi antara Penerima Bantuan dengan Penyedia/toko bahan bangunan. Kurangnya komunikasi ini terjadi pada pengiriman bahan bangunan yang terlambat sehingga menyebabkan pembangunan rumah terhambat. Kemudian kurangnya komunikasi juga terjadi antara penerima bantuan dengan Tukang/pekerja, dimana terdapat tukang/pekerja yang secara mendadak mengundurkan diri. Hal tersebut dapat berdampak pada proses

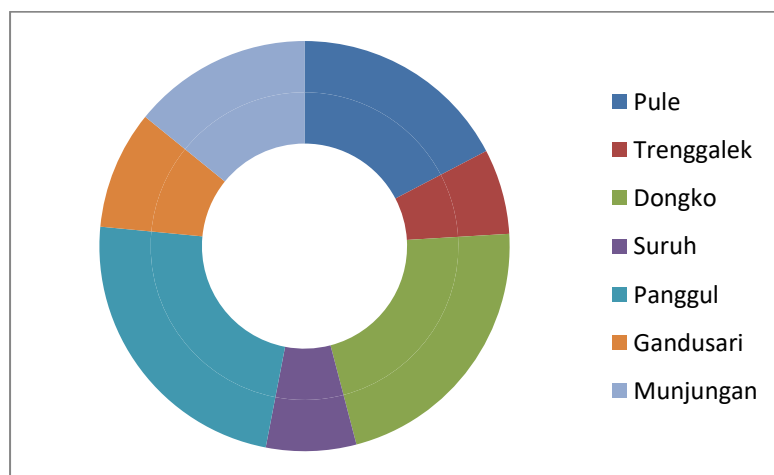
pelaksanaan program bantuan di desa Watuagung ini. Namun selama pelaksanaan program, penerima bantuan telah mengkomunikasikan kendala-kendala tersebut kepada TFL. Dengan begitu TFL dapat mencari solusi untuk menangani masalah tersebut. Baik dengan berkoordinasi dengan penerima bantuan, tukang/pekerja, maupun pihak toko/penyedia bahan bangunan. Oleh sebab itu, terjadi komunikasi yang positif pada pelaku pelaksana kegiatan BSPS di desa Watuagung.

### **Dampak Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Watuagung, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek**

Suatu kebijakan maupun program yang telah diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat pasti akan berdampak pada masyarakat itu sendiri. Dimana keberhasilan tersebut dapat dilihat maupun dinilai melalui respon masyarakat akan kebijakan tersebut. Respon masyarakat pada suatu kebijakan dapat mempengaruhi besarnya dampak kebijakan tersebut. Dampak dari program ini dapat dilihat melalui implementasi yang telah dilakukan selama pelaksanaan penyaluran bantuan. Berikut merupakan dampak dari implementasi penyaluran BSPS di desa Watuagung, Kecamatan, Dongko, Kabupaten Trenggalek.

#### **1. Dampak Implementasi Subsidi**

Dengan disalurkan subsidi pemerintah melalui BSPS, terdapat perbedaan kondisi kesejahteraan penerima bantuan. sebelum program BSPS disalurkan, penerima bantuan harus membagi pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dengan kebutuhan pokok lainnya. Dimana bantuan subsidi pemerintah telah terealisasi sesuai dengan rencana penyaluran bantuan sebelumnya, kondisi tersebut terlihat pada data sebagai berikut.



**Bagan 3.** Jumlah Penerima Bantuan Subsidi Pemerintah, Kabupaten Trenggalek Tahun 2022

*Sumber: Data Diolah*

Bagan diatas menunjukkan bahwa kecamatan dongko merupakan kecamatan yang paling banyak mendapatkan penyaluran bantuan subsidi pemerintah. bantuan ini membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya khususnya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Dalam hal ini kebutuhan tempat tinggal seperti memperbaiki kerusakan rumah ataupun memenuhi komponen rumah yang belum dimiliki. Sedangkan kondisi ekonomi penerima bantuan ini merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Dimana pendapatan setiap bulannya tidak

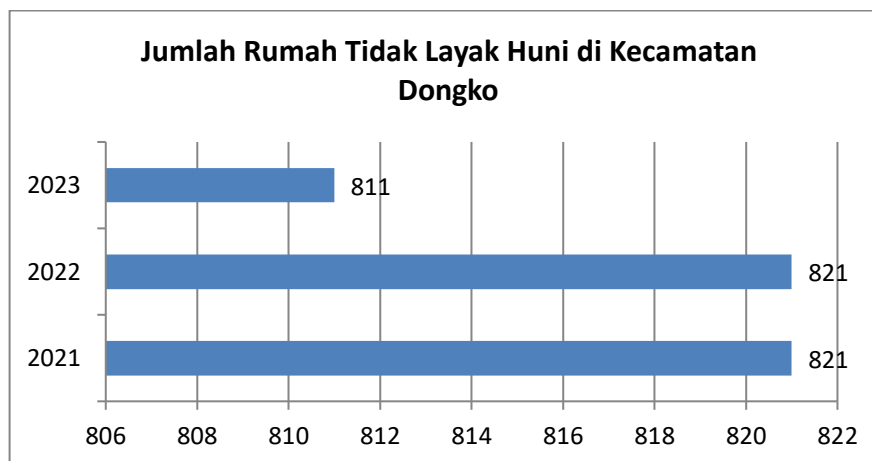


dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh sebab itu, setelah disalurkan program BSPS, penerima bantuan tidak lagi menyisihkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Pendapatan PB dapat dioptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok lainnya, baik kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan begitu taraf hidup penerima bantuan dapat semakin meningkat. Selain itu, pembayaran upah tukang/pekerja juga dapat berdampak terhadap tukang/pekerja. Dimana dana tersebut dapat meningkatkan pendapatannya meskipun tidak bersifat jangka panjang.

Begitu juga dengan pihak toko/penyedia bahan bangunan yang pendapatannya meningkat setelah adanya penyaluran program BSPS. Pembelian bahan bangunan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan dilakukan secara terpusat di toko yang telah disepakati sebelumnya dan telah melakukan kontrak kerja sama. Sebelum adanya penyaluran program BSPS toko tersebut hanya mendapatkan pemasukan dari pelanggan-pelanggan yang telah bekerja sama saja. Namun setelah adanya penyaluran program BSPS di desa Watuagung, toko tersebut mengalami peningkatan pemasukan. Setiap penerima bantuan melakukan pembelian bahan bangunan di toko tersebut sebesar Rp. 17.500.000,- dimana terdapat 10 penerima bantuan yang ada di desa Watuagung. Oleh sebab itu, terjadi peningkatan pembelian bahan bangunan yang artinya juga terjadi peningkatan pemasukan pada toko tersebut.

## 2. Dampak Implementasi Pembangunan Rumah Layak Huni

Keadaan atau kondisi fisik rumah penerima bantuan sebelum disalurkan program BSPS termasuk dalam kategori RTLH. Sebagian besar kondisi rumah yang dihuni penerima bantuan tidak memiliki struktur dan terjadi kerusakan non stuktur pada bangunannya. Beberapa rumah juga berdiri dari tembok kayu yang sudah berkeropos. Adapun kondisi pencahayaan dan penghawaan rumah yang kurang. Akses sanitasi yang sulit dan biaya yang pembangunan yang kurang terjangkau juga membuat sebagian besar rumah penerima bantuan tidak memiliki akses sanitasi. Hal ini mencerminkan rumah yang tidak layak huni karena dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan penghuninya. Namun setelah disalurkan program BSPS, penerima bantuan dapat menghuni rumah yang layak. Seluruh rumah telah memiliki struktur sesuai standar yang berlaku sehingga keselamatan penghuni dapat terjamin. Dengan begitu jumlah RTLH di kecamatan Dongko dapat berkurang, hal ini sesuai dengan data pada bagan dibawah ini.



**Bagan 3.** Jumlah RTLH di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2023

*Sumber: Data Diolah*

Data diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah rumah layak huni tahun 2023 di kecamatan Dongko. Penyaluran program BSPS di desa Wtuagung dapat berdampak pada pemenuhan rumah layak huni di kecamatan Dongko. Selain itu, implementasi pembangunan rumah layak huni juga berdampak pada lingkungan sekitar. Keadaan atau kondisi lingkungan sekitar sebelum penyaluran BSPS cenderung kumuh. Kondisi rumah yang tidak layak huni membuat kepedulian masyarakat pada sekitar juga berkurang. Lingkungan rumah yang kumuh menimbulkan berbagai penyakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat itu sendiri. Hal ini berdampak pada kesehatan penghuni rumah tersebut. Namun, setelah dilakukan penyaluran BSPS, kondisi lingkungan sekitar rumah penerima bantuan menjadi lebih sehat dan terawat. Pencahayaan dan penghawaan rumah yang cukup serta tersedianya akses sanitasi juga dapat menjamin kesehatan masyarakat. Edukasi yang diberikan kepada penerima bantuan terkait perawatan rumah beserta lingkungannya juga berdampak pada peningkatan kepedulian penerima bantuan terhadap lingkungannya. Dengan begitu kondisi lingkungan penerima bantuan dan sekitarnya menjadi lebih bersih dan terlepas dari lingkungan kumuh. Oleh sebab itu, implementasi pembangunan rumah layak huni ini berdampak pada peningkatan kesehatan penerima bantuan.

### 3. Dampak Implementasi Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan selama penyaluran BSPS telah berdampak pada keswadayaan penerima bantuan di desa Watuagung. Penerima bantuan berupaya untuk memberikan swadayaanya untuk membangun rumah layak huni. Adapun keswadayaan yang diberikan berupa bahan bangunan lama yang layak dipakai, tabungan yang dimiliki, hasil panen ataupun ternak, saudara, dan lain sebagainya. Swadaya penerima bantuan ini telah mendorong kelancaran pelaksanaan penyaluran BSPS. Dengan begitu upaya pemerintah dalam pemenuhan dapat terselenggara dengan baik. Selain itu, pelaksanaan pemberdayaan ini juga berdampak pada hubungan sosial masyarakat desa watuagung. Hal ini dikarenakan proses pembangunan rumah penerima bantuan membutuhkan kerjasama dari masyarakat sekitar. Apabila swadaya yang diberikan oleh penerima bantuan kurang membantu proses pembangunan dalam

hal ini tukang/perkerja, maka diperlukan gotong royong dari warga sekitar. Sikap kepedulian dan gotong royong masyarakat desa Watuagung terbukti dapat mempercepat proses penyelesaian pembangunan rumah penerima bantuan.

## KESIMPULAN

Melalui penjelasan uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya, dengan begitu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi penyaluran BSPS di Desa Watuagung, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek adalah telah terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni bagi 10 penerima bantuan. Meskipun selama pelaksanaan pembangunan rumah layak huni masih memerlukan dana lebih dari subsidi yang telah disalurkan pemerintah, namun keswadayaan penerima bantuan telah membantu mewujudkan pembangunan rumah yang layak.
2. Dampak dari implementasi BSPS di Desa Watuagung, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek adalah telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik penerima bantuan, toko/penyedia bahan bangunan maupun tukang/pekerja, meningkatkan jumlah rumah layak huni, dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Penyaluran BSPS telah mengurangi beban penerima bantuan yang merupakan MBR untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak. Begitu juga dengan toko/penyedia bahan bangunan yang mengalami peningkatan pemasukan dan tukang/pekerja yang mendapatkan upah kerja. Selain itu, keberhasilan pembangunan rumah layak huni untuk 10 penerima BSPS telah meningkatkan kualitas rumah layak huni di desa Watuagung. Dimana pemberdayaan masyarakat selama penyaluran berlangsung juga telah mendorong keswadayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumahnya.

## REFERENSI

- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146-150.
- Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 35-47.
- Handayani, D., & Safrida, S. (2022). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 34-45.
- Hariyani, T. (2016). Dampak implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (studi di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri). *Jurnal Ekuivalensi*, 2(2), 77-99.
- Herlina, D. (2021). *Analisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Menyediakan Rumah Layak Huni Di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2399.
- Khaatimah, H., & Wibawa, R. (2017). Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition Terhadap Hasil Belajar. *Jurnal Teknologi Pendidikan: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2), 76-87.
- Mamangkey, A., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2019). Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di kecamatan amurang timur kabupaten minahasa selatan. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Mulyadi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 744-754.
- Pratama, M. R. A. (2022). *Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Desa Krobakan Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Rofiqoh, S., & Asmuni, A. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2017. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 3(1), 25-39.
- Rosyidi, H.P. (2019). Peran bank sampah syariah sumringah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (perspektif maqashid syariah). Skripsi tidak dipublikasikan. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Setiyawati, W., & Oktafia, R. (2021). Analisis Pengembangan Usaha Kecil, Dan Menengah Pada Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bordir Kecamatan Beji (Ditinjau Dari Maqashid Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 1-8.
- Sjafari, A. (2023). Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Niara*, 16(1), 1-13.
- Sukmadinata, N.S. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Qomaria, A. (2015). Dampak sosial ekonomi dan lingkungan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(1), 1-7.
- Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino, S. (2021). Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(1), 15-22.